

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu kegiatan atau mandat dari seseorang. Perencanaan strategi instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab semua tuntutan perkembangan lingkungan strategi lokal, nasional maupun global.

Dalam membangun suatu runtutan perencanaan kita harus menganalisis lingkungan untuk mendapatkan informasi tentang perhitungan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang ada didalam lingkungan masyarakat. Analisis tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perencanaan yang akan kita susun untuk meningkatkan keberhasilan dalam suatu instansi pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (DISNAKERTRANS).

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) merupakan instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 yang merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Provinsi Jawa barat yang berada di Jln. Soekarno Hatta no 532 memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung di bidang

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan fungsi : merumuskan kebijakan teknis bidang tenaga kerja; melaksanakan tugas teknis operasional bidang tenaga kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta kesejahteraan tenaga kerja dan penganggur. Sesuai dengan tugasnya itu, instansi ini membutuhkan suatu sistem informasi yang mudah diakses, akurat, cepat dan tepat. Permasalahan yang terjadi di Sub Bagian Rencana dan Pelaporan pada DISNAKERTRANS yaitu belum tersedianya tempat penyimpanan yang dapat mengorganisir data-data Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari tiap bidang lainnya yang akan dikelola menjadi laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi provinsi Jawa Barat tugasnya tidak hanya mengurus semua perluasan tenaga kerja ataupun yang lainnya, ada pula bagian yang mengurus semua perencanaan yang akan dilaksanakan oleh semua sub bagian. Yaitu sub bagian Perencanaan dan Pelaporan yang bertugas melaksanakan perencanaan, pengendalian kegiatan, membantu Sekretaris Dinas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Pemerintah pada akhirnya bertujuan untuk mempermudah bagaimana cara mengelola data dan informasi dengan cepat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Informasi and Communication Technologi/ICT*) memberikan kemudahan dalam meningkatkan hubungan antar badan balai, sub bagian dan

bidang-bidang lain. Pelayanan Dinas yang diberikan yaitu penyampaian data laporan dan informasi tentang bagaimana susunan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Dinas yang lain.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memberikan rencana perancangan sistem informasi untuk memfasilitasi pegawai pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendapatkan data informasi rencana kerja yang akan diolah oleh semua sub bagian dinas itu sendiri. Melalui sistem informasi ini yang dapat menyediakan tempat penyimpanan data rencana kerja yang dapat mengorganisir dari setiap bidang UPTD/UPTB lainnya yang dalam lingkungan internal maka semua pegawai dari tiap bidang UPTD/UPTB dapat membagikan data informasi rencana kerja dengan mudah sehingga sub bagian perencanaan dan pelaporan dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengelola data-data rencana kerja sesuai kebutuhan untuk pembuatan laporan..

Sehingga dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat laporan berjudul **“Analisis Sistem Pengelolaan Laporan Rencana Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu langkah sebelum menentukan rumusan masalah pada objek yang diteliti dan rumusan masalah merupakan definisi masalah yang terjadi pada objek tertentu.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan masalah yang timbul, berupa tidak tersedianya tempat penyimpanan data rencana kerja anggaran yang terorganisir dengan bidang-bidang UPTD/UPTB lainnya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat di ambil rumusan masalahnya berupa bagaimana menyediakan tempat penyimpanan data rencana kegiatan anggaran tersebut dapat terorganisir dengan bidang-bidang lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan melaksanakan praktek kerja lapangan untuk memenuhi syarat nilai akademik perkuliahan dan ditugaskan untuk menganalisis suatu objek yang diteliti.

1.3.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk dapat membuat sistem informasi Bank Data pada Subbag. Perencanaan dan Pelaporan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan dan analisis sistem Pengelolaan data yang sedang berjalan pada bagian Perencanaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk melakukan pembuatan sistem informasi berdasarkan hasil analisis sistem yang sedang berjalan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pembuatan sistem informasi yang dilaksanakan pada saat praktek kerja lapangan.

1. Sistem informasi yang di bangun hanya memfasilitasi penyimpanan data rencana kerja anggaran yang akan dikelola menjadi laporan oleh Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
2. Sistem informasi bank data sebagai media penyimpanan bahan laporan yang akan di kelola pada Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan berlangsung selama 1 bulan terhitung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 yang bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 532 Bandung.

NO	Aktivitas	Waktu			
		Agustus			
		Minggu-1	Minggu-2	Minggu-3	Minggu-4
1	Analisis kebutuhan (observasi dan wawancara)				
2	Desain Sistem (penggambaran sistem yang berjalan dan sistem usulan)				
3	Penulisan Kode Program (penulisan kode program berdasarkan penggambaran sistem)				
4	Pengujian Sistem (menguji sistem yang akan diterapkan)				
5	Penerapan Sistem (menerapkan atau mengimplementasikan sistem yang dibuat)				

Tabel 1.5 Jadwal Praktek Kerja Lapangan